

PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JOMBANG DALAM PROGRAM IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL

Cika Meisa Adinda

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
cikameisa.20042@mhs.unesa.ac.id

Galih Wahyu Pradana

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
galihpradana@unesa.ac.id

Abstrak

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia meluncurkan program IKD sebagai bentuk digitalisasi layanan. Kabupaten Jombang termasuk dalam sepuluh daerah dengan partisipasi IKD terendah di Jawa Timur. Namun faktanya Kabupaten Jombang memiliki potensi yang mendukung untuk mengimplementasikan program ini yaitu penduduk usia produktif tinggi dan kepadatan penduduk tinggi, sehingga peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dalam program Identitas Kependudukan Digital. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun fokus dari penelitian ini berdasarkan pada teori peran oleh Siagian (2018) meliputi stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana. Hasilnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang sebagai stabilisator yaitu memberikan sosialisasi ke tujuh sekolah; melakukan bimbingan teknik untuk pegawai; dan membuka layanan pengaduan. Sebagai inovator, yaitu jemput bola ke perusahaan swasta dan menciptakan Desa Digital. Sebagai modernisator, yaitu memastikan ketersediaan komputer dan pelaporan jumlah aktivasi program melalui WhatsApp. Sebagai pelopor, melakukan gerakan aktivasi internal kepada OPD; pemasangan banner di kecamatan; dan mempromosikan melalui instagram. Sebagai pelaksana, yaitu tahap perencanaan dengan membuat rencana kegiatan, mengkoordinasikan berbagai pihak pada tahap pengimplementasian, serta melakukan evaluasi bersama provinsi, internal, dan seluruh kecamatan. Peneliti menyarankan untuk memperluas cakupan sosialisasi, mengembangkan upaya yang lebih bervariasi, dan mengintegrasikan IKD dalam layanan dokumen lainnya.

Kata Kunci: Peran, Identitas, Kependudukan

Abstract

The Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia launched the IKD program as a form of service digitization. Jombang district is among the 10 regions with the lowest IKD participation in East Java. However, the fact that Jombang Regency has the potential to support the implementation of this program, namely a high productive age population and high population density, so that the role of the Population and Civil Registration Office of Jombang Regency is important to increase community participation. This study aims to determine the role of the Population and Civil Registration Office of Jombang Regency in the Digital Population Identity program. This research uses qualitative research with data collection methods through observation, interviews and documentation. The focus of this research is based on the role theory by Siagian (2018) including stabilizers, innovators, modernizers, pioneers, and implementers. As a result, the Population and Civil Registration Office of Jombang Regency as a stabilizer, namely providing socialization to seven schools; conducting technical guidance for employees; and opening a complaint service. As an innovator, the Office of Population and Civil Registration went to private companies and created a Digital Village. As a modernizer, ensuring computer availability and reporting the number of program activations via WhatsApp. As a pioneer, conducting internal activation movements to OPDs; installing banners in sub-districts; and promoting through Instagram. As an implementer, namely the planning stage by making an activity plan, coordinating various parties at the implementation stage, and conducting evaluations with the province, internally, and all sub-districts. Researchers suggest expanding the scope of socialization, developing more varied efforts, and integrating IKD in other document services.

Keywords: Role, Identity, Population

PENDAHULUAN

Pengguna internet di Indonesia mencapai angka 215,63 juta orang atau sekitar 78,19% dari jumlah seluruh masyarakat Indonesia yang diperoleh dari hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada periode 2022-2023. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin melek dengan internet. Pada pemerintahan penerapan sistem elektronik dapat menciptakan transparansi atau keterbukaan sebagai penyedia layanan untuk masyarakat (Muliawaty dan Hendryawan, 2020). Hal yang menjadi tantangan adalah memastikan bahwa semua warga negara dapat mengakses layanan *digital government* dengan baik. Perkembangan infrastruktur teknologi di Indonesia telah mengalami peningkatan, namun masih ada ketidaksetaraan dalam akses dan kualitas jaringan internet di berbagai daerah (Jayanthi dan Dinaseviani, 2022). Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses transformasi digital dapat diakses secara adil dan setara terhadap semua masyarakat. Keberhasilan transformasi digital akan membawa manfaat besar untuk masyarakat, oleh sebab itu penting bagi pemerintah agar memastikan bahwa tidak ada kesenjangan akses digital untuk perkembangan negara dan kesejahteraan rakyatnya.

Salah satu bentuk digitalisasi layanan yang diciptakan oleh pemerintah Indonesia yaitu aplikasi Identitas kependudukan Digital (IKD). Hal ini merupakan bentuk adaptasi dari pemerintah terhadap perubahan serta perkembangan dalam bidang teknologi informasi guna menghadapi era digitalisasi. Pemerintah daerah bertugas dalam mengimplementasikan infrastruktur digital dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi. Bagi warga negara Indonesia yang berumur 17 tahun sudah menjadi kewajiban untuk membuat E-KTP. Akan tetapi masih terdapat beberapa masalah dalam proses pembuatan E-KTP, dimana hal ini turut menjadi alasan diciptakannya IKD. Permasalahan tersebut diantaranya yaitu terbatasnya pengadaan blanko karena membutuhkan biaya yang cukup besar, kasus penyalahgunaan anggaran dalam proyek E-KTP yang berdampak signifikan pada kerugian negara, dan antrian panjang dalam pengurusan E-KTP di tingkat daerah.

Tabel 1. Anggaran Pengadaan Blanko E-KTP di Indonesia Tahun 2022 – 2024

Tahun	Anggaran	Jumlah Blanko
2022	Rp106,4 miliar	10 juta
2023	Rp106,4 miliar	10 juta
2024	Rp224 miliar	22 juta

Sumber : Kementerian Keuangan, 2022-2024

Berdasarkan tabel diatas yang diperoleh dari Buku II Nota Keuangan beserta APBN 2022 - 2024 maka dapat

diperhitungkan biaya satu keping blanko E-KTP sekitar 10.000. Hal tersebut sesuai dengan keputusan dari kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan Kementerian Dalam Negeri yang telah menyepakati biaya blanko untuk setiap kepingnya sebesar Rp 9.548. Pada tahun 2023, pengadaan 10 juta blanko E-KTP dari APBN habis sebelum tahun berakhir, sehingga diperlukan tambahan melalui *automatic adjustment* pencadangan belanja kementerian/lembaga. Jadi jumlah keseluruhan anggaran yang dikeluarkan pada tahun 2023 untuk pengadaan blanko E-KTP yaitu sekitar Rp240 miliar untuk 24 juta keping. Menurut Dirjen Zudan, menyatakan bahwa KTP Digital akan dapat mengurangi biaya pengadaan blanko KTP, sehingga KTP Digital ini berperan penting untuk menekan anggaran yang tidak pasti akibat penambahan jumlah pengadaan blanko.

Kabupaten Jombang termasuk 10 daerah dengan partisipasi masyarakat terendah dalam program IKD di Jawa Timur. Kabupaten-kabupaten lainnya yaitu Bangkalan, Sampang, Trenggalek, Sumenep, Pacitan, Pamekasan, Jombang, Nganjuk, Situbondo, dan Ngawi. Dari daftar ini, Kabupaten Jombang menempati urutan ke-7 dengan angka persentase partisipasi masyarakat yang masih rendah, yaitu sebesar 3,10%. Namun ditemukan fakta bahwa Kabupaten Jombang memiliki potensi yang mendukung untuk mengimplementasikan program IKD yaitu kabupaten yang termasuk dalam lima kabupaten dengan penduduk usia produktif tertinggi di Jawa Timur. Empat kabupaten dan kota lainnya yang termasuk dalam kategori ini diantaranya yaitu Kabupaten Sidoarjo, Kota Batu, Kabupaten Gresik, dan Kota Surabaya. Usia produktif (15 hingga 64 tahun), merupakan kelompok usia yang dikenal sebagai pengguna teknologi yang tinggi akan memberi peluang besar untuk pengembangan infrastruktur digital dan peningkatan partisipasi program IKD.

Selain hal tersebut, Kabupaten Jombang juga memiliki potensi besar lainnya untuk mencapai angka partisipasi yang tinggi dalam program IKD yaitu kepadatan penduduknya terbanyak di Jawa Timur. Merujuk pada data yang diperoleh dari Badan Pusat Statitika Jawa Timur, Kabupten Jombang masuk dalam kategori 10 penduduk terbanyak di Jawa Timur, dengan sembilan wilayah lainnya yaitu Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Blitar, Kota Probolinggo, Kabupaten Sidoarjo. Menurut Arsandi dan Dimas (2020), semakin tinggi tingkat kepadatan penduduknya maka semakin banyak juga infrastruktur yang tersedia. Hal ini berarti bahwa wilayah yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi berpotensi memiliki akses yang lebih baik terhadap infrastruktur. seperti jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan jaringan komunikasi. Fakta bahwa Jombang berada dalam kelompok ini menunjukkan bahwa Jombang

memiliki potensi yang signifikan untuk mengimplementasikan program IKD namun terdapat kesenjangan antara potensi pengguna dan realisasi penggunaan di lapangan.

Tabel 2. Jumlah pengguna Identitas Kependudukan Digital Jumlah Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Jombang Tahun 2024

No	Nama Kecamatan	Wajib KTP	Jumlah Pengguna IKD
1	Perak	43.208	2.688
2	Gudo	44.409	2.044
3	Ngoro	59.782	3.889
4	Bareng	44.322	2.780
5	Wonosalam	26.227	951
6	Mojoagung	61.544	4.941
7	Mojowarno	73.684	3.781
8	Diwek	83.745	5.010
9	Jombang	107.168	5.139
10	Peterongan	52.711	4.852
11	Sumobito	66.802	3.135
12	Kesamben	52.193	1.706
13	Tembelang	43.215	2.826
14	Ploso	32.924	857
15	Plandaan	30.369	1.007
16	Kabuh	33.912	2.166
17	Kudu	25.149	925
18	Bandar Kedung Mulyo	38.912	1.626
19	Jogoroto	53.309	1.592
20	Megaluh	31.532	784
21	Ngusikan	18.127	972
JUMLAH		1.023.244	53.667

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, 2024

Jumlah kepemilikan KTP di Kabupaten Jombang pada tahun 2024 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang yaitu 1.023.244 penduduk. Berdasarkan data terbaru hingga Mei 2024 jumlah pengguna IKD di Kabupaten Jombang hanya mencapai 53.667 orang. Berdasarkan data tersebut dapat diperhitungkan persentase pengguna IKD hanya sebesar 5,24% dari total penduduk yang memiliki KTP di wilayah Kabupaten Jombang. Angka ini jauh di bawah target minimal 25% yang ditetapkan Direktorat Jenderal Kemendagri, hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan adopsi IKD di Kabupaten Jombang masih perlu ditingkatkan.

“Saya tidak tahu sama sekali tentang program tersebut, bahkan saya belum pernah melihat orang-orang disekitar saya menggunakan aplikasi tersebut, makanya saya tidak menggunakan aplikasi tersebut karena tidak ada informasi tentang aplikasi IKD.” (Wawancara, 5 Juni 2024)

Wawancara dengan seorang penduduk berusia 19 tahun ini menunjukkan permasalahan utama dalam program IKD yaitu kurangnya tingkat pemahaman dan kesadaran mengenai IKD. Ketidakhahaman ini membatasi akses mereka untuk terlibat aktif dalam

program IKD. Sedangkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang faktor penyebab sekaligus tantangan dalam program IKD di Kabupaten Jombang yakni dikarenakan terbatasnya sumber daya yang dimiliki, baik dari segi anggaran ataupun kapasitas tenaga kerja. Anggaran yang terbatas ini berakibat membatasi kemampuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi secara luas dan intensif. Selain itu, jumlah tenaga kerja yang terlatih dan berkompeten dalam bidang teknologi digital yang tidak mencukupi juga menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan program IKD. Kondisi tersebut membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang melaksanakan tugasnya dengan kapasitas yang kurang optimal, hal tersebut menyebabkan dampak dari program IKD belum bisa dirasakan oleh masyarakat secara maksimal. Perihal keterbatasan anggaran dan tenaga kerja diungkapkan oleh Bapak Sudarto

“Jumlah staf yang ada disini tidak cukup untuk menangani beban kerja yang meningkat akibat penerapan sistem baru dari IKD. Staf yang menangani IKD hanya dua pegawai yang mana juga menangani berbagai dokumen kependudukan lainnya, apalagi untuk program IKD ini diperlukan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena keterbatasan pada hal-hal tersebut maka tidak banyak yang bisa kami lakukan untuk mengupayakan program IKD.” (Wawancara, 4 Juni 2024)

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa masih ditemukan beberapa permasalahan dalam program Identitas Kependudukan Digital. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengambil topik ini dikarenakan IKD baru diluncurkan pemerintah pusat pada pertengahan tahun 2022 namun mulai diterapkan untuk masyarakat umum pada awal tahun 2023. Maka dari itu diperlukannya penelitian lebih lanjut terkait peran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dalam program Identitas Kependudukan Digital ke penduduk yang sudah memiliki e-KTP agar meningkatkan angka aktivasi IKD guna mewujudkan reformasi birokrasi di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *case study* (studi kasus). Menurut Moleong dalam (Maulidiya, 2021) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sedangkan untuk pendekatan dalam penelitian ini menggunakan studi kasus (*case study*) karena penelitian

ini berfokus pada analisis mendalam mengenai peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dalam program Identitas Kependudukan Digital sehingga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena tersebut secara komprehensif. Hal tersebut sejalan dengan definisi studi kasus yang dikemukakan oleh John W. Creswell dalam (Widhagdha, 2022) yaitu sebuah penelitian dimana peneliti mendalami sebuah fenomena tertentu atau kasus yang terjadi dalam waktu dan konteks tertentu (seperti program, kejadian, acara, proses, institusi, atau kelompok sosial), yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara rinci dan mendalam melalui berbagai metode pengumpulan data selama periode waktu tertentu. Adapun fokus dari penelitian ini adalah berdasarkan pada teori peran oleh Siagian (2018) yang meliputi lima kategori diantaranya sebagai berikut :

1. Sebagai Stabilisator
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dalam menjalankan peran sebagai stabilisator, dimana berusaha untuk menciptakan dan memelihara kestabilan dalam proses implementasi dan penggunaan identitas digital.
2. Sebagai Inovator
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang berperan sebagai inovator dengan mendorong pengembangan ide atau solusi baru dalam program IKD, dan resolusi masalah terutama dalam hal peningkatan angka aktivasi pengguna Identitas Kependudukan Digital.
3. Sebagai Modernisator
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang berperan sebagai modernisator dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memperbarui dan meningkatkan cara pemerintah mengelola identitas penduduk.
4. Sebagai Pelopor atau Pionir
Sebagai pelopor, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang berperan sebagai pelopor melalui program Identitas Kependudukan Digital dengan menjadi perintis atau penggerak utama dalam mempromosikan aplikasi Identitas Kependudukan Digital kepada masyarakat.
5. Sebagai Pelaksana
Sebagai pelaksana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang mengambil alih peran langsung dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi seluruh proses dan sistem identitas digital.

Subjek dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini menjadi sumber informasi yang memiliki pengetahuan atau pengalaman relevan dengan topik penelitian yang

sedang dilakukan. Sumber data pada penelitian ini diambil dari sumber data primer serta sumber data sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dari (Sugiyono, 2019) yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya untuk teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas Kependudukan Digital merupakan sebuah aplikasi yang dirancang serta dikembangkan oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri untuk memudahkan penduduk dalam pengurusan dokumen yang membutuhkan data kependudukan. Syarat pembuatan IKD yaitu memiliki *handphone*, memiliki E-KTP fisik atau sudah melakukan perekaman KTP, memiliki e-mail serta nomor ponsel. Keberadaan IKD ini bertujuan untuk memberikan akses yang efisien, efektif, dan terjamin keamanannya dalam berbagai layanan publik serta memfasilitasi proses administratif yang efisien serta melindungi kepemilikan identitas kependudukan melalui aplikasi yang terjamin keamanannya untuk menghindari terjadinya pemalsuan data. Penerbitan atau aktivasi IKD ini dapat dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayahnya masing-masing ataupun ke instansi-instansi pemerintah lainnya yang sudah diberikan kepercayaan untuk mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital yang lebih dekat dengan domisili seperti kecamatan ataupun kelurahan.

1. Stabilisator

Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang sebagai stabilisator dalam program Identitas Kependudukan Digital dengan menjaga kestabilan dan kelancaran pelaksanaan program tersebut melalui upaya sosialisasi dan edukasi yang intensif untuk mencegah terjadinya gejolak sosial di masyarakat. Penyuluhan ataupun penyampaian materi diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan yang komprehensif dan terintegral mengenai program yang dijalankan secara tepat dan akurat (Palilu, 2018). Sosialisasi ini dilakukan di berbagai tingkat, mulai dari desa, kecamatan, hingga lembaga pendidikan dari jenjang SMA hingga perguruan tinggi, yang mana pada jenjang ini siswa sudah memiliki E-KTP, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Sudarto, administrator database kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Jombang.

“Sosialisasi dari pihak Dispendukcapil Kabupaen Jombang dilakukan mulai dari desa dan kecamatan, untuk dua tempat ini tidak dilakukan secara langsung oleh Dispendukcapil namun mengimbau setiap kecamatan agar dilakukan sosialisasi, jika dilakukan sosialisasi langsung oleh Dispendukcapil akan membutuhkan waktu yang lama karena ada sekitar 302 desa dengan 4 kelurahan di 21 kecamatan. Kemudian juga dilaksanakan sosialisasi

untuk sekolah-sekolah bersamaan dengan kegiatan pembuatan KTP di sekolah tersebut.” (Wawancara, 3 Juni 2024)



Gambar 1. Sosialisasi ke salah satu sekolah di Jombang
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, 2023

Sosialisasi untuk sekolah-sekolah difokuskan pada siswa sebagai target utama karena mereka lebih cepat beradaptasi dengan teknologi digital. Pada kegiatan ini, petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang menjelaskan materi terkait dengan manfaat dari IKD, mekanisme aktivasi, dan cara menggunakan aplikasinya. Siswa juga mendapatkan bimbingan langsung untuk melakukan pendaftaran dan aktivasi akun. Sekolah sebagai titik efektif untuk memperkenalkan teknologi ini karena lingkungan pendidikan mendorong keterbukaan terhadap inovasi dan teknologi baru. Sosialisasi ini melibatkan tujuh sekolah, dimana pemilihan sekolah-sekolah tersebut dilakukan secara acak tanpa kriteria khusus. Berikut daftar sekolah yang sudah dilakukan sosialisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang.

Tabel 3. Sekolah yang sudah dilakukan sosialisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2023

No	Nama Sekolah	Tanggal	Jumlah Siswa yang Aktivasi
1	STIKES Jombang	3 Februari 2023	349
2	MAN 1 Jombang	20 Februari 2023	296
3	MA Hasyim Asy'ari	15 Maret 2023	120
4	SMK Sultan Agung Diwek	25 Maret 2023	150
5	SMA Negeri Mojoagung	10 April 2023	215
6	SMA Negeri Jogoroto	18 April 2023	180
7	SMK Dwija Bakti	5 Mei 2023	140

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, 2023

Upaya lain yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang adalah bimbingan teknis (bimtek) untuk staff yang menangani program IKD. Melalui peningkatan efisiensi dalam program Identitas Kependudukan Digital sehingga akan ke arah yang lebih responsif terhadap kebutuhan zaman. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang memaksimalkan SDM yang ada guna menangani program IKD, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan dan bimbingan teknis. Sehingga dapat dipastikan bahwa staf yang bertugas memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai untuk mendukung dan mensosialisasikan program IKD, hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Sudarto bahwa

“Dispendukcapil Kabupaten Jombang mengadakan bimbingan teknis khusus kepada pegawai yang bertanggung jawab mengurus program IKD. Dengan memastikan bahwa staf yang bertugas memahami teknologi dengan baik, mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal serta mampu mendukung kepentingan masyarakat mengatasi berbagai kendala yang mungkin dihadapi dalam menggunakan aplikasi IKD sehingga program IKD dapat terlaksana dengan lancar dan diterima secara positif oleh masyarakat.” (Wawancara, 3 Juni 2024)



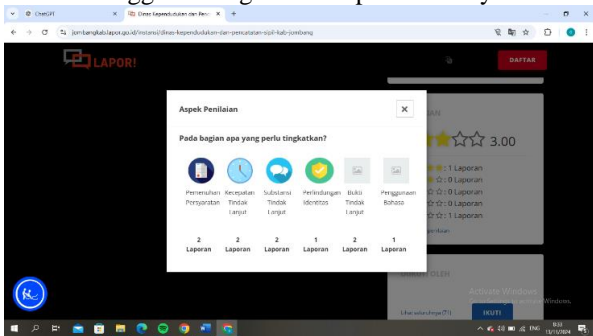
Gambar 2. Bimbingan Teknis Program Identitas Kependudukan Digital

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, 2024

Bimbingan teknis ini dirancang untuk memperkuat kolaborasi antara Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dengan seluruh kecamatan di Jombang dalam menyukseskan program digitalisasi kependudukan. Pegawai kecamatan diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dalam menyampaikan edukasi untuk masyarakat tentang pentingnya IKD serta agar menjadi lebih siap dalam menghadapi berbagai situasi dan tantangan yang mungkin timbul di lapangan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang memiliki tanggung jawab selain memberikan layanan prima kepada masyarakat, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mendorong transformasi digital dalam pengelolaan data kependudukan. Hal ini menunjukkan komitmen Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dalam menjaga stabilisasi secara menyeluruh, baik dari sisi teknologi maupun kualitas sumber daya manusia.

Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kabupaten Jombang juga melakukan upaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban dengan membuka layanan pengaduan masyarakat untuk merespons keluhan atau masalah yang terjadi selama proses pembuatan IKD. Dengan menyediakan mekanisme pengaduan yang transparan dan mudah diakses seperti platform media sosial Instagram, website resmi dinas, website lapor, email, call center, hingga layanan WhatsApp, melalui kanal pengaduan tersebut dinas dapat merespons permasalahan dengan cepat, menjaga ketertiban, serta meningkatkan kepuasan masyarakat dengan layanan yang diberikan. Upaya ini sejalan dengan hasil penelitian dari Syafri dkk (2024), yang menunjukkan bahwa layanan pengaduan publik berperan penting karena terbukti membantu dalam menangani pengaduan dengan jelas dan terarah sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat.



Gambar 3. Layanan Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang
Sumber : Website Lapor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, 2024

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang memiliki mekanisme respons yang sistematis. Setiap pengaduan yang diterima dicatat dan diproses oleh tim pelayanan khusus untuk menangani masalah terkait identitas kependudukan digital. Pengaduan seperti kesalahan data atau kesulitan teknis dalam penggunaan aplikasi, petugas dinas segera merespons melalui platform yang sama, memberikan solusi sementara atau mengarahkan masyarakat ke langkah-langkah yang perlu diambil lebih lanjut, serta menindaklanjuti setiap pengaduan dengan cepat dan transparan. Proses ini tidak hanya memastikan setiap masalah ditangani dengan baik, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja yang diberikan. Hal ini diungkapkan oleh staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang sebagai berikut

"Sebenarnya layanan pengaduan masyarakat sudah ada sejak lama, dengan pengaduan mengenai kesalahan data pada dokumen, proses pembuatan KTP yang memakan waktu lama, atau kendala dalam perubahan status kependudukan. Namun dengan adanya program IKD ini, kami juga mulai menerima keluhan mengenai program tersebut. Pengaduan yang kami terima dalam program ini

diantaranya kesulitan mengaktifkan akun, kurangnya pemahaman cara melakukan." (Wawancara, 3 Juni 2024)

2. Inovator

Pemerintah sebagai inovator yaitu harus menjadi sumber dengan memberikan ide-ide baru bagi masyarakat, melalui penerapan inovasi dimana pemerintah harus memiliki inovasi yang bersifat konseptual, inovasi dalam sistem, terhadap prosedur, serta metode kerja dalam mencapai sebuah tujuan yang diinginkan (Elviana dan Fadhly, 2021). Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang sebagai inovator dalam program Identitas Kependudukan Digital dapat dilihat melalui proses dan praktik kerja yang terfokus pada pengembangan ide terhadap program IKD ataupun solusi baru terhadap permasalahan yang muncul. Upaya yang dilakukan yaitu melaksanakan jemput bola ke perusahaan swasta yaitu di pabrik MPS (Mitra Produksi Sigaret) Perdula yang merupakan mitra produksi dari PT. HM Sampoerna. Pendekatan ini merupakan upaya strategis untuk mencapai target baru, yaitu bukan hanya remaja yang sudah memiliki KTP, tetapi juga orang dewasa yang aktif di sektor swasta. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Sudarto selaku staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

"Pihak Dikendukcapil Kabupaten Jombang melakukan jemput bola di sektor swasta, yaitu di MPS Perdula pada bulan Februari 2023, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Pegawai MPS Perdula yang berpartisipasi dalam kegiatan jemput bola program IKD ini sekitar 300-an orang dan kegiatan jemput bola berjalan lancar tanpa ada penolakan dari pegawai." (Wawancara, 3 Juni 2024)

Kegiatan kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dengan perusahaan swasta ini dilaksanakan dengan mengajak seluruh karyawan yang hadir untuk mendownload dan melakukan aktivasi akun IKD. Pada kegiatan tersebut sebanyak 330 karyawan berhasil melakukan aktivasi, terdiri dari berbagai jabatan, seperti manajer, supervisor, staf administrasi, teknisi, dan staff lainnya dengan rentang usia 21 hingga 60 tahun. Aktivasi ini dilakukan dengan memberikan arahan, bimbingan teknis, dan panduan langsung dari staf Dinas Kependudukan kepada para karyawan. Fokus pada kegiatan tersebut tidak hanya pada proses teknisnya, namun juga mengedukasi karyawan tentang manfaat jangka panjang dari Identitas Kependudukan Digital. Kolaborasi dengan perusahaan swasta ini merupakan bentuk kegiatan jemput bola ke perusahaan swasta yang mana diharapkan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran serta pemahaman mengenai pentingnya transformasi digital dalam urusan kependudukan, dan memastikan seluruh karyawan dapat memanfaatkan layanan ini dengan baik. Melalui kolaborasi ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang berkomitmen agar terus memberikan dukungan untuk perusahaan dalam

memfasilitasi karyawan agar terlibat aktif dalam program digitalisasi kependudukan.



Gambar 4. Jemput Bola Program Identitas Kependudukan Digital di MPS Perdula

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, 2024

Pemerintah harus mampu memberikan konsep-konsep sebagai sumber ide atau gagasan baru bagi masyarakat (Nugroho dan Pradana, 2021). Dalam upaya mengembangkan ide untuk meningkatkan angka aktivasi identitas kependudukan digital, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang telah merumuskan solusi inovatif melalui konsep Desa Digital. Konsep ini dirancang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat untuk melakukan aktivasi akun IKD secara lebih praktis dan terjangkau dari tempat tinggal seluruh masyarakat. Langkah yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan memberikan tanggung jawab kepada pemerintah desa untuk terlibat langsung dalam program IKD. Dalam implementasinya, pemerintah desa dapat memberikan masyarakat setempat seperti bimbingan dan pendampingan teknis langsung dalam hal pengunduhan aplikasi, aktivasi akun, hingga sinkronisasi data kependudukan digital. Dengan demikian, pemerintah desa berperan sebagai wakil atau ekstensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang yang lebih dekat kepada seluruh masyarakat untuk mempercepat proses transformasi digital administrasi kependudukan.



Gambar 5. Desa digital untuk seluruh desa di Kabupaten Jombang

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, 2024

Menurut Putro dkk (2023) menyatakan bahwa, mengubah proses pengurusan dan pelayanan administrasi di desa dapat meningkatkan kualitas layanan dan informasi untuk masyarakat, karena akses yang lebih

mudah dan layanan yang cepat. Keikutsertaan pemerintah desa dalam program ini diharapkan dapat meminimalisir kendala yang dihadapi masyarakat, khususnya mereka yang kurang familiar dengan teknologi digital. Pendekatan ini memanfaatkan kedekatan fisik dan hubungan sosial antara masyarakat desa dan aparat desa, yang seringkali lebih memahami kondisi dan kebutuhan warga lokal. Selain itu, langkah ini juga mengurangi beban di tingkat kabupaten dan mempercepat proses aktivasi akun Identitas Kependudukan Digital. Hal ini juga didukung wawancara dengan staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang yaitu Bapak Sudarto

"Desa digital adalah solusi yang kami kembangkan agar program IKD bisa lebih mudah diakses oleh masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah pedesaan yang belum memiliki akses cukup baik terhadap teknologi atau belum paham sepenuhnya cara menggunakan aplikasi IKD. Sebelumnya, tugas pengaktifan ini sudah diberikan kepada pihak kecamatan, namun kami berencana memperluas cakupannya hingga ke tingkat desa." (Wawancara, 3 Juni 2024)

3. Modernisator

Peran sebagai modernisator merupakan bentuk dari upaya pemerintah yang beradaptasi atau menyesuaikan dirinya dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, terkait dengan implementasi modernisasi ini mengacu terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pada pengembangan Sumber Daya Manusia (Saragi, 2022). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berperan sebagai modernisator dalam program IKD yaitu membuat grup WhatsApp untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Jombang untuk laporan harian program IKD. Digitalisasi ini membantu mengurangi kesalahan data dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan informasi kependudukan. Menurut Bapak Sudarto, bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang melalui adopsi teknologi dalam program IKD dengan memastikan pada kemudahan penggunaan sehingga memungkinkan seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dengan hambatan yang minim, disampaikan sebagai berikut

"Setiap hari perwakilan desa dan kecamatan melaporkan progres program IKD melalui grup WhatsApp yang dibuat oleh Dispendukcapil Jombang. Rata-rata laporan dari seluruh kecamatan mencapai lebih dari 100 per hari. Jadi melalui grup WA tersebut jika ada yang masih sedikit biasanya kami juga memberikan saran agar lebih ditingkatkan lagi edukasi yang diberikan mengenai IKD kepada masyarakat." (Wawancara, 3 Juni 2024)



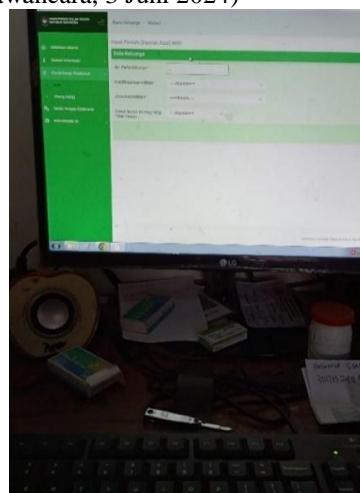
Gambar 6. Grup WhatsApp yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk Laporan Setiap Kecamatan

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, 2024

Grup WhatsApp tersebut kini berfungsi sebagai sarana komunikasi yang lebih fleksibel, tidak hanya untuk pelaporan mingguan tetapi juga diskusi dan penyampaian informasi program IKD. Hal ini menunjukkan bahwa proses ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam hal pelaporan namun juga dapat membangun jaringan komunikasi yang lebih erat antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dengan seluruh kecamatan. Penggunaan WhatsApp sebagai media pelaporan juga sejalan dengan pola komunikasi masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi *mobile*. Pembuatan grup ini merupakan langkah modernisasi dalam pelaporan program Identitas Kependudukan Digital, melalui aplikasi chatting yang biasa digunakan pada aktivitas sehari-hari sehingga dapat dijadikan solusi yang lebih efisien serta mudah diakses oleh semua kecamatan di Kabupaten Jombang. Penggunaan WhatsApp sebagai platform utama mempermudah staff kecamatan untuk mengirimkan laporan, mengatasi hambatan jarak, dan mempercepat aliran informasi tanpa memerlukan sistem yang lebih rumit. Sehingga melalui akses yang lebih mudah maka laporan dari setiap kecamatan dapat dikumpulkan dengan tepat waktu.

Menurut Ramadhan dkk (2023), penggunaan teknologi dalam penguatan infrastruktur merupakan hal yang penting dan harus diperhatikan, teknologi merupakan komponen yang penting dalam infrastruktur digital. Upaya lainnya yaitu dengan menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai untuk pengolahan data kependudukan secara elektronik. Selain untuk mendukung kelancaran layanan digital, perangkat komputer juga diperlukan dalam menangani proses administrasi serta mencegah terjadinya antrian panjang. Namun masih terdapat keterbatasan komputer yang tersedia di kantor karena hanya terdapat dua unit dan kedua komputer tersebut tidak hanya digunakan untuk program IKD, tetapi juga difungsikan untuk mengurus berbagai layanan administrasi lainnya, seperti pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga, e-KTP, dan lain sebagainya yang memerlukan akses online. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Sonia Alfinuriza selaku staf pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagai berikut

“Kami memiliki dua komputer yang digunakan untuk mendukung implementasi program IKD. Komputer-komputer ini berfungsi untuk memproses data identitas kependudukan secara digital, sehingga mempercepat dan mempermudah pengelolaan data tersebut. Namun kedua komputer ini juga kami gunakan untuk memproses pembuatan dokumen kependudukan lainnya, seperti KK, KTP dan akta kelahiran. Dengan adanya fasilitas ini, kami berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien untuk masyarakat.” (Wawancara, 3 Juni 2024)



Gambar 7. Komputer di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Jombang untuk program IKD
Sumber : Dokumentasi peneliti, 2024

4. Pelopor/Pionir

Sebagai penggerak utama atau pelopor, pemerintah tidak hanya berperan sebagai perumus kebijakan dan pelaksana pembangunan yang inovatif melainkan juga sebagai panutan (*role mode*) yang memberikan contoh positif untuk masyarakat (Rois dkk, 2024). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang berperan sebagai pelopor dengan memimpin pengimplementasian perubahan yang positif dalam penggunaan program IKD dalam administrasi kependudukan. Upaya ini diwujudkan melalui gerakan aktivasi internal oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jombang. Kegiatan ini menekankan pentingnya setiap pegawai memiliki akun IKD yang aktif sebelum program ini dipromosikan lebih luas kepada masyarakat, sebagai bentuk komitmen internal dalam mendukung transformasi layanan administrasi digital. Gerakan ini dijelaskan oleh Bapak Sudarto sebagai berikut,

“Sejak bulan November tahun 2022 Dispendukcapil Kabupaten Jombang sudah mulai melaksanakan gerakan aktivasi secara menyeluruh kepada seluruh OPD di Jombang. Sedangkan seluruh pegawai di Dispendukcapil

Jombang sendiri sebelum acara tersebut sudah punya aplikasinya.” (Wawancara, 3 Juni 2024)

Seluruh pegawai di lingkungan OPD Kabupaten Jombang diwajibkan untuk mendownload dan mengaktifkan aplikasi IKD terlebih dahulu sebelum aplikasi ini diperkenalkan kepada masyarakat umum. Langkah ini bertujuan untuk memberikan contoh nyata dan memastikan kesiapan internal sebelum mendorong partisipasi masyarakat dalam program IKD. Kegiatan gerakan aktivasi internal ini diawali dengan, seluruh pegawai dinas dihibau dan diwajibkan untuk memiliki akun Identitas Kependudukan Digital sebagai bentuk kepatuhan dan contoh bagi masyarakat. Langkah ini bertujuan agar setiap pegawai tidak hanya memahami cara penggunaan aplikasi tersebut, tetapi juga mampu menjadi contoh bagi masyarakat umum dan mendorong peningkatan partisipasi publik dalam program IKD.



Gambar 8. Gerakan Aktivasi Internal oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Jombang
Sumber : Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, 2024

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang juga telah mengambil langkah strategis lainnya dalam menjalankan perannya sebagai pelopor dalam program IKD dengan melakukan pemasangan banner di seluruh kecamatan. Upaya ini bertujuan untuk memperkenalkan program IKD kepada masyarakat, yang mungkin tidak memiliki akses ke media sosial atau jauh dari kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jombang. Kegiatan pemasangan banner ini bukan hanya bertujuan dalam menyampaikan informasi, melainkan juga untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya program IKD. Kegiatan ini merupakan langkah awal yang sangat signifikan dalam upaya memperkenalkan program IKD kepada masyarakat serta untuk menciptakan keterlibatan yang lebih aktif dari masyarakat dalam program IKD. Melalui cara ini, pemasangan banner tidak hanya menjadi sarana informasi, tetapi juga sebagai pemicu bagi masyarakat untuk lebih proaktif dalam mengurus identitas mereka.



Gambar 9. Pemasangan banner di Kecamatan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang
Sumber : Dokumentasi peneliti, 2024

Ada banyak kelompok di masyarakat yang beragam dan masing-masing memiliki kepentingannya sendiri, maka dari itu akan lebih mudah dalam mengakomodir kepentingan yang ada (Mahardhani., dkk 2020). Pemasangan banner menjadi bentuk dukungan teknis dan komunikasi visual yang berkelanjutan, mengingat tidak semua masyarakat aktif di media sosial atau memiliki akses informasi secara daring. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Jombang berupaya memastikan jika pesan tentang pentingnya identitas digital tersampaikan dengan jelas ke seluruh lapisan masyarakat melalui pemasangan banner ini. Selain itu, banner ini membantu memberikan arahan kepada masyarakat agar mereka merasa didukung dan difasilitasi dalam melakukan aktivasi akun IKD. Dengan adanya informasi visual yang mudah diakses di lokasi strategis, diharapkan masyarakat dapat segera memahami prosedur aktivasi dan manfaat dari penggunaan IKD. Selain itu, pemasangan banner menjadi bukti nyata bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang memastikan transisi menuju layanan administrasi kependudukan berbasis digital berjalan dengan baik.



dispendukcapiljombang IKD / KTP Digital adalah produk hukum resmi dari pemerintah. Sesuai dengan Permendagri No. 72 tahun 2022.

Jadi jangan ragu untuk instal dan aktivasi IKD/KTP Digital ya

Gambar 10. Promosi Identitas Kependudukan Digital oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, 2024

Menurut Wibowo dkk (2022), Pemerintah yang berperan sebagai pelopor juga melakukan pemasaran dengan promosi-promosi terhadap program atau kegiatan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang juga melakukan upaya lain dengan memanfaatkan media sosial sebagai platform promosi. Pada era digital seperti sekarang ini, media sosial merupakan salah satu alat komunikasi yang paling efektif untuk menjangkau masyarakat luas. Melalui akun resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang aktif membagikan informasi mengenai program IKD, termasuk manfaat, cara aktivasi, dan langkah-langkah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang tepat dan akurat dapat diakses oleh semua kalangan. Hal tersebut dijelaskan Bapak Sudarto, staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

“Sejak awal program IKD diluncurkan, kami telah memanfaatkan Instagram sebagai salah satu saluran untuk mempromosikan program ini. Kami menyadari bahwa Instagram merupakan platform yang sangat populer di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga kami ingin memastikan bahwa informasi mengenai IKD dapat dijangkau oleh sebanyak mungkin orang.” (Wawancara, 3 Juni 2024)

Pada awal implementasi aplikasi IKD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang melakukan promosi secara intensif yang diunggah setiap dua minggu dengan konten mencakup ajakan, panduan, langkah-langkah aktivasi aplikasi serta manfaat dari penggunaan IKD. Namun, seiring meningkatnya partisipan dalam program ini, frekuensi posting konten tersebut mengalami penyesuaian menjadi diunggah sekitar sebulan sekali. Kemudian untuk saat ini, posting di Instagram lebih diarahkan pada dokumentasi kegiatannya, seperti pelatihan, sosialisasi, dan kolaborasi dengan pihak eksternal. Hal tersebut lebih berfungsi sebagai bentuk laporan publik dan transparansi mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan. Namun usaha promosi di Instagram ini masih kurang maksimal juga, karena masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam upaya ini yaitu kurangnya interaksi dan respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat di kolom komentar. Ketika pengguna Instagram menanyakan informasi lebih lanjut atau meminta penjelasan tambahan tentang IKD, sering kali mereka tidak mendapatkan jawaban.

5. Pelaksana

Perencanaan dilakukan dalam setiap kegiatan untuk meraih tujuan yang telah ditentukan (Oktavianus dan Kaja, 2022). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang berperan aktif sebagai pelaksana dalam program IKD dengan melakukan perencanaan strategis untuk mengoptimalkan pelaksanaan program ini yaitu dengan menyusun perencanaan kegiatan secara rinci yang meliputi langkah-langkah, waktu pelaksanaan, serta tujuan kegiatan. Perencanaan ini dirancang secara sistematis dan dibahas dalam rapat triwulanan yang

melibatkan berbagai unit di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang. Perencanaan kegiatan disusun agar mendapatkan gambaran jelas mengenai berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode waktu tertentu. Penyusunan perencanaan ini memiliki tujuan supaya tiap kegiatan yang dijalankan selaras dengan target pemerintah pusat dan menghasilkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengaktivasi identitas digital mereka.



Gambar 11. Tahap Perencanaan Program IKD oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, 2024

Perencanaan yang matang sangat penting mengingat skala dan dampak dari program ini yang berhubungan langsung dengan data kependudukan seluruh warga Kabupaten Jombang. Salah satu langkah penting dalam perencanaan tersebut adalah penyusunan jadwal kegiatan secara terstruktur. Dengan adanya jadwal yang jelas tersebut, diharapkan kegiatan-kegiatan dapat dilakukan secara konsisten dan tepat sasaran, sehingga jumlah masyarakat yang mengaktifkan akun IKD terus meningkat. Selain berfungsi sebagai panduan operasional, jadwal tersebut juga menjadi acuan untuk evaluasi kinerja staf dalam pelaksanaan program.

Apabila pemerintah sebagai implementator dalam mengimplementasikan kebijakan bersikap baik maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik, begitu pula dengan sebaliknya (Anwar dkk, 2021). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang juga menjalankan perannya sebagai pelaksana dalam pengimplementasian program IKD dengan mengoordinasikan berbagai pihak terkait agar implementasi program ini berjalan sesuai tujuan dan menghasilkan capaian optimal. Koordinasi ini mencakup berbagai sektor seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pihak swasta, sekolah-sekolah, masyarakat, dan seluruh kecamatan di Kabupaten Jombang. Setiap pihak memiliki peran spesifik yang disinergikan agar seluruh kegiatan dapat terarah dan efektif dalam meningkatkan partisipasi warga dalam aktivasi identitas digital.



Gambar 12. Tahap Pengimplementasian Program IKD oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, 2024

Koordinasi langsung ini memudahkan dinas dalam mengidentifikasi dan mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program IKD. Dalam praktiknya, setiap interaksi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang berlangsung dalam suasana terbuka, di mana berbagai stakeholder yang terlibat diberikan kesempatan untuk bertanya dan memberikan masukan terkait program IKD sehingga strategi yang diambil dapat lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan adanya dialog langsung antara petugas dan warga, sehingga lebih banyak informasi dapat diterima dan disampaikan secara langsung. Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Sudarto selaku staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang yang menyatakan bahwa

“Dispendukcapil Kabupaten Jombang mengkoordinasikan langsung semua pihak yang terlibat dalam pengimplementasian program IKD tanpa campur tangan pihak perantara. Kami percaya dengan melakukan semuanya sendiri mulai dari perencanaan hingga evaluasi, kami dapat menjalankan program ini lebih runtut dan sistematis.”

(Wawancara, 3 Juni 2024)

Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tidak berhenti pada kerja sama formal dengan lembaga dan perusahaan, tetapi juga melibatkan masyarakat secara langsung. Masyarakat yang tengah memproses KTP atau dokumen lainnya juga diajak untuk langsung melakukan aktivasi identitas digital di lokasi layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang. Kemudian masyarakat tersebut didampingi langsung oleh staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dalam proses aktivasi Identitas Kependudukan Digital. Keseluruhan koordinasi ini dilakukan secara terstruktur agar setiap rencana yang sudah disusun dapat terlaksana sesuai dengan sasaran atau target yang ditetapkan serta menghasilkan dampak nyata.

Evaluasi kebijakan merupakan penilaian menyeluruh terhadap masukan, prosedur, keluaran, dan hasil kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Nabilah dkk., 2022). Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang melakukan berbagai upaya dalam pengevaluasian program Identitas Kependudukan Digital untuk memastikan efektivitas dan peningkatan partisipasi masyarakat. Evaluasi ini dilakukan secara bertahap dan mencakup tiga tingkatan, yang masing-masing berperan penting dalam perbaikan dan penyesuaian program IKD agar berjalan maksimal. Pengevaluasian terhadap program IKD ini juga dijelaskan oleh Bapak Sudarto sebagai berikut:

“Evaluasi ini ada tiga diantaranya evaluasi dari pihak provinsi untuk mengukur capaian kami dibandingkan dengan daerah lain, evaluasi internal untuk menilai kinerja kami sendiri dan memperbaiki kekurangan, evaluasi terhadap seluruh kecamatan untuk memastikan implementasi di lapangan berjalan sesuai rencana.” (Wawancara, 3 Juni 2024)

Evaluasi program IKD merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan dalam peningkatan angka aktivasi akun. Melalui evaluasi ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dapat memantau dan menilai sejauh mana pelaksanaan program di lapangan sejalan terhadap rencana yang sudah disusun. Evaluasi ini juga membantu dalam mengidentifikasi kendala atau masalah yang muncul, sehingga bisa segera diberikan solusi yang tepat agar pelaksanaan kegiatan dapat ditingkatkan. Dinas akan meninjau aktivitas yang sudah dilakukan. Selain itu, evaluasi juga mencakup penggunaan sumber daya yang terlibat, seperti tenaga kerja, biaya operasional, serta anggaran yang dialokasikan untuk setiap kegiatan. Data terkait jumlah aktivasi yang dicapai dan respon masyarakat di lapangan juga dianalisis untuk melihat efektivitas upaya yang telah dilakukan.



Gambar 13. Tahap Evaluasi Program IKD oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, 2024

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan penelitian ini, diantaranya kepada

1. Ibu Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Administrasi Negara
2. Bapak Galih Wahyu Pradana, S.A.P., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi
3. Bapak Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP. selaku dosen penguji satu skripsi
4. Bapak Deby Febriyan Eprilianto, S.Sos., MPA. selaku dosen penguji dua skripsi
5. Dosen-dosen Jurusan Administrasi Publik Universitas Negeri Surabaya yang telah memberikan dukungan
6. Seluruh pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang
7. Semua pihak yang terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam penyusunan penelitian ini

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dalam program IKD menjalankan peran dengan cukup baik walaupun masih terdapat beberapa hal yang menjadi kendala. Hal ini diketahui berdasarkan teori Siagian (2018), yaitu peran pemerintah sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana dalam mengimplementasikan IKD. Sebagai stabilisator, dinas memberikan sosialisasi ke 7 sekolah dan seluruh kecamatan; bimbingan teknik; serta membuka layanan pengaduan. Sebagai inovator, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang melaksanakan kegiatan jemput bola ke perusahaan swasta yaitu MPS Perdula PT Sampoerna serta menciptakan Desa Digital. Sebagai modernisator, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang memastikan ketersediaan perangkat komputer yang memadai dan layak serta membuat grup WhatsApp untuk pelaporan jumlah masyarakat yang sudah aktivasi. Sebagai pelopor, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang melakukan gerakan aktivasi internal kepada OPD; pemasangan banner di seluruh kecamatan; serta mempromosikan program IKD melalui instagram. Sebagai pelaksana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang membuat rencana kegiatan untuk mengoptimalkan program IKD; pada implementasi, dinas mengkoordinasikan berbagai pihak terkait; serta untuk tahap evaluasi program IKD ada evaluasi dari provinsi, evaluasi pihak internal, dan evaluasi ke seluruh kecamatan.

Dalam pelaksanaan program Identitas Kependudukan Digital, kelima peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dalam program Identitas Kependudukan Digital saling mempengaruhi dan berkesinambungan. Sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana, masing-masing

peran memiliki kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan program. Jika salah satu peran tidak dijalankan secara maksimal, hal ini akan berdampak pada efektivitas program secara keseluruhan. Namun, meskipun satu peran kurang optimal, hal tersebut tidak akan secara langsung mempengaruhi indikator lainnya di fokus peran yang berbeda. Dengan kata lain, kekurangan dalam satu aspek tidak sepenuhnya menghambat indikator kinerja di aspek lain, tetapi tetap dapat mengurangi sinergi keseluruhan program. Oleh sebab itu, upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk memastikan setiap peran dijalankan dengan baik sangat penting untuk memperoleh hasil yang optimal dalam program IKD.

Saran

Berdasarkan simpulan mengenai peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dalam program Identitas Kependudukan Digital diberikan beberapa saran oleh peneliti yang diharapkan dapat menjadi alternatif dalam membantu dan meminimalisir kendala ataupun menyempurnakan program Identitas Kependudukan Digital. Beberapa saran tersebut yakni :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu untuk mengembangkan cakupan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terbatas hanya untuk sekolah-sekolah tertentu
2. Pada pengimplementasian program IKD, seharusnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang juga mengimplementasikan aplikasi tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang bisa menggunakannya untuk urusan administrasi kependudukan lainnya tanpa harus memerlukan fotokopi KTP.
3. Dalam promosi program IKD, terutama melalui platform Instagram, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang seharusnya lebih responsif supaya dapat menghindari kebingungan di masyarakat. Keberadaan media sosial sebagai alat promosi yang efektif tidak hanya memerlukan konten informatif, tetapi juga interaksi yang aktif dengan audiens.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program Identitas Kependudukan Digital. Meskipun sudah ada monitoring melalui grup WhatsApp, evaluasi yang lebih mendalam dan terstruktur tetap diperlukan. Evaluasi ini harus mencakup penilaian terhadap keberhasilan program, serta identifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang harus terus mengembangkan berbagai program yang lebih variatif dalam rangka mendukung keberhasilan program Identitas Kependudukan Digital. Dengan memperkenalkan lebih banyak inisiatif yang beragam, masyarakat tidak hanya akan mengetahui adanya program IKD, tetapi juga benar-benar memahami cara menggunakannya serta manfaat yang bisa diperoleh..

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. A, dkk. 2021. Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Merelokasi Pedagang Kaki Lima di New Mall Pasar Sentral Kota Makassar. 2(6).
- Arsandi, Arga Satria dan Dimas Wahyu. 2020. Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Infrastruktur Di Kota Semarang. Riptek, 12(1), 55-70.
- Elviana, Icha dan Zuhrizal Fadhly. 2021. Peran Dinas Pendidikan dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Nagan Raya. Journal of Social and Policy Issues, 1(2).
- Jayanthi, Ria dan Anggini Dinaseviani. 2022. Kesenjangan Digital dan Solusi yang Diterapkan di Indonesia selama Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu Pengetahuan dan teknologi Komunikasi, 24 (2).
- Mahardhani, Ardhana Januar, Sulton dan Sunarto. 2020. Peran Civil Society Organization (CSO) Dalam Perumusan Kebijakan Publik (Kajian Di Kabupaten Ponorogo). Journal of Public Sector Innovations, 4 (2).
- Maulidiya, Wahyuningsih (2021) Dampak Pengetahuan Akuntansi, Pengalaman Usaha, Kebijakan Pemerintah Dan Strategi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Perekonomian Selama Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pada UMKM Mitra Indomaret Di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor). Skripsi thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Muliawaty, Lia dan Shofwan Hendryawan. 2020. Peranan E-Government dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang). Jurnal Ilmu Administrasi, 11 (2).
- Nabilah, Anisah Farras dan Tjitjik Rahaju. 2022. Evaluasi Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dalam Pembangunan Desa di Desa Tlogosari, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo. Publika, 10(4).
- Nugroho, Bonifasius Efsiko dan Galih W Pradana. 2021. Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya. Publika 9(3).
- Oktavianus, O., & Kaja, K. A. J. A. 2022. Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang, 20(1).
- Palilu, A. (2018). Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial Di Kelurahan Klawuyuk Kota Sorong. Journal of Dedication to Papua Community, 1(1).
- Putro, Aditya Dwi, dkk. 2023. Digitalisasi Desa untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi dan Mewujudkan Kebumen Smart Village. Prosiding Seminar Nasional pengabdian kepada Masyarakat, 4(1).
- Ramadhan, Ayuda, Bustami Usman, dan Wais Alqarni. 2023. Penguatan Infrastruktur Digital dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Smart Governance di Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK, 8.
- Rois, Daimatul Munawwaroh, Taufiq Rahman Ilyas, dan Langgeng Rachmatullah Putra. 2024. Peran Pemerintah Kota Malang dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan KotaMalang). Respon Publik, 18(3).
- Saragi, Yudha Pratama. 2022. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara. Diploma thesis, Insitut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Siagian, Sondang P. 2018. Administrasi Pembangunan. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabet.
- Syafri, Wirman, dkk. 2024. Efektivitas Penyelesaian Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi Layanan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Jurnal Kajian Pemerintah, 10 (2).
- Wibowo, Hery dkk. 2023. Edukasi Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Keberfungsian Sosial Masyarakat Desa Dayeuhkolot Kecamatan Dayeuhkolot kabupaten Bandung. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 4 (3).
- Widhagdha, Miftah Faridl dan Suryo Ediyono. 2022. Case Study Approach in Community Empowerment Research in Indonesia. Indonesian Journal of Social Responsibility Review, 1 (1)

